

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KABUPATEN WONOSOBO

IMPROVING THE QUALITY OF THE SETTLEMENT THROUGH KOTA TANPA KUMUH PROGRAM IN WONOSOBO REGENCY

Oleh : Sulista Yuniati dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si, FIS, UNY,
sulistayuniati.01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketercapaian peningkatan kualitas permukiman melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Wonosobo sampai akhir tahun 2017. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Desain penelitian ini dianggap mampu menjelaskan penelitian ini secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan pengurangan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo terutama yang masuk dalam SK Bupati belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari empat indikator pengukuran peningkatan kualitas permukiman melalui evaluasi program dengan model *CIPP* (*Context, Input, Process, Product*). Dari keempat dimensi tersebut, penanganan permukiman kumuh sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran program dengan intervensi kegiatan yang telah dilakukan oleh para aktor. Capaian penanganan permukiman kumuh sampai tahun 2017 hanya seluas 9,79 hektar. Hambatan dalam pelaksanaan yaitu faktor anggaran, lahan dan pola pikir masyarakat. Implementasi program juga di dukung oleh swadaya masyarakat yang tinggi sebagai pelaksana dan kolaborasi antar aktor yang terlibat.

Kata Kunci: Peningkatan Kualitas, Program Kota Tanpa Kumuh, Evaluasi

ABSTRACT

This research aimed to evaluate of achievement in improving the quality of settlement through the Kota Tanpa Kumuh Program in Wonosobo Regency untill the end of 2017. The design of the research used descriptive with qualitative approach. The research design was considered able to explain this research in depth. The results showed that the management implementation of reducing the slum settlement in Wonosobo regency, especially those included in Decree of Regent, it has not been effectively. It can be seen through the four indicators of the measurement in improving the quality of the settlement was through program evaluation with CIPP (Context, Input, Process, Product) model. With those four dimensions, the management of slum settlement has been running in accordance with the purposes and the targets of the program by the activity intervention that has been done by the actors. The achievement of the slum settlement management untill 2017 was only an area of 9.79 hectares. The obstacles in the implementation are the budget, land and local community's mindset factor. The implementation of the program was also supported by the high of the community's innate strenght as the implementers and the collaboration between the actors that are involved.

Keywords: Improving the Quality, Kota Tanpa Kumuh Program, Evaluation

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang berlangsung dengan pesat telah menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa terutama di wilayah perkotaan. Salah satu aspek yang sangat terasa adalah semakin sulitnya memenuhi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal bagi penduduk. Hal itu disebabkan karena terbatasnya kemampuan untuk membangun perumahan yang layak serta semakin terbatasnya lahan perkotaan untuk membangun permukiman yang mencukupi dan memenuhi syarat. Penduduk yang semakin bertambah disertai arus urbanisasi yang tinggi, maka masalah pembangunan dalam hal ini penyediaan sarana permukiman menjadi semakin mendesak, terutama di daerah perkotaan yang akan menyebabkan ketimpangan pembangunan. Sehingga diperlukan fasilitas yang perlu disediakan di suatu lingkungan permukiman.

Terdapat lima bentuk fasilitas yang perlu disediakan di suatu lingkungan permukiman, meliputi: (a) penyediaan air bersih, (b) penyaluran air kotor, (c) pembuangan limbah padat, (d) drainase, dan (e) jalan lingkungan (Raldi Hendro K, 2001:75). Kota Wonosobo adalah sata satu kota yang tidak lepas dari permasalahan permukiman kumuh. Perkembangan dan pertumbuhan Kota Wonosobo yang cukup pesat di samping memperlihatkan hasil

yang positif juga menimbulkan masalah-masalah bagi pemerintah daerah seperti permasalahan permukiman kumuh. Dengan adanya hal tersebut maka pemerintah mulai fokus dengan pengentasan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Beberapa kawasan di Kabupaten Wonosobo masih memiliki permasalahan permukiman kumuh. Hal ini dapat dilihat dari SK Bupati Wonosobo Nomor:653/247/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Wonosobo

Tabel 1. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Wonosobo

No	Nama Kawasan	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang	Kumuh Berat
1	Jaraksari	30,309 Ha	- Ha	- Ha
2	Sambek	15,07 Ha	- Ha	- Ha
3	Mlipak	13,091 Ha	- Ha	- Ha
4	Longkrang	0,909 Ha	- Ha	- Ha
5	Sumberan Barat	4,252 Ha	- Ha	- Ha
6	Puntuk	4,943 Ha	- Ha	- Ha
7	Kliwonan	2,26 Ha	- Ha	- Ha
Total		70,834 Ha	- Ha	- Ha

Sumber : SK Bupati Wonosobo
Nomor:653 /247/2014

Dari tabel tersebut, dapat dilihat tujuh kawasan di Kabupaten Wonosobo yang masih terdapat kawasan kumuh dan masuk dalam kategori kumuh ringan. Luasan kumuh yang paling luas adalah wilayah Jaraksari yaitu 30,309 hektar. Luasan kumuh yang ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Wonosobo seluas 70,834 hektar, yang diharapkan mampu menjadi nol hektar luasan kumuh di tahun 2019.

Hal tersebut juga di dukung adanya kebijakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar. Oleh karena itu, Ditjen Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Daerah sebagai koordinator atau motor penggerak untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Kebijakan tersebut dibuat untuk menangani permasalahan permukiman sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang

spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. di dalam “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksana atau implementornya, berapa besat dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan, yaitu cara yang merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yaitu tujuan dan sasaran (Samodra Wibawa, 1994:15).

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Berikut tahap-tahap kebijakan publik (Winarno, 2014:36) adalah:

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

Pelaksanaan program KOTAKU dilakukan menggunakan tiga pola penanganan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011, yaitu pencegahan, peningkatan kualitas dan pengelolaan. Dalam penanganan permukiman kumuh, terdapat tujuh indikator untuk mengukur

tingkat kekumuhan di masing-masing wilayah yaitu kondisi bangunan yang meliputi keteraturan bangunan dan kepadatan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih /minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik. Hal tersebut sesuai dengan sasaran program gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses air minum, 0% luas kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi yang terdiri dari persampahan, limbah dan drainase lingkungan.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui peningkatan kualitas permukiman melalui program KOTAKU dapat dilihat dari ketercapaian sasaran melalui evaluasi program. Seorang ahli yang sangat terkenal dalam evaluasi program bernama Stufflebeam (1971, dalam Fernandes 1984) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 40), membedakan model evaluasi menjadi tujuh yaitu:

1. *Goal Oriented Evaluation Model*
2. *Goal Free Evaluation Model*
3. *Formatif Summatif Evaluation Model*

4. *Countenance Evaluation Model*
5. *CSE-UCLA Evaluation Model*
6. *CIPP Evaluation Model*
7. *Discrepancy Model*

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang dikenal dengan *CIPP Evaluation Model*. Pada model evaluasi tersebut terdapat empat indikator untuk mengukur keberhasilan program yaitu:

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), yaitu dengan menilai kebutuhan, masalah, asset dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang dan hasilnya.
2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*), bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternative apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.
3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*), merupakan pemeriksaan yang sedang berlangsung pada pelaksanaan rencana serta dokumentasi proses untuk membantu melaksanakan keputusan serta menilai dan mendeteksi implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para

pelaksana dalam menjalankan kegiatan yang akan dilakukan dengan keterlibatan berbagai pihak yang ada dalam program tersebut.

4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*), merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Model evaluasi ini digunakan dalam penelitian untuk melihat sasaran sebuah evaluasi program yang terdiri dari konteks, input, proses dan produk. Model ini menganalisis sebuah program berdasarkan dengan komponen-komponennya dari sebuah program kegiatan. Model ini menilai kebutuhan awal dengan memberikan gambaran umum sampai dengan pelaksanaan program serta produk yang di hasilkan dalam proses implementasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui evaluasi pelaksanaan program KOTAKU dengan melihat intervensi yang dilakukan oleh para aktor untuk mengurangi tingkat kekumuhan di Kabupaten Wonosobo.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo khususnya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kantor Koordinator Kota Program KOTAKU dan lima kelurahan yang masuk dalam SK Kumuh yaitu Jaraksari, Sambek, Mlipak, Wonosobo Timur dan Wonosobo Barat. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 - 4 Desember 2017.

Subjek Penelitian

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Cipta Karya, Koordinator Kota, Asisten Koordinator Kota, Bapak Lurah, LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan Masyarakat.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi terkait dengan peningkatan kualitas permukiman melalui program KOTAKU sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat di lokasi penelitian.

Instrument Penelitian

Instrument utama di dalam penelitian ini merupakan peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi terkait persiapan peneliti untuk terjun lapangan. Sedangkan

instrument pengumpul data selain peneliti adalah berbagai bentuk alat bantu seperti pedoman wawancara, alat untuk merekam saat wawancara, kamera, dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian dan berfungsi sebagai instrument pendukung dalam penelitian yang dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang di observasi. Observasi ini dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik tentang peningkatan kualitas permukiman melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Wonosobo dengan melihat langsung pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai instrument dan dikembangkan di lapangan. Dalam wawancara ini peneliti berusaha menggali bagaimana peningkatan kualitas permukiman melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Wonosobo.

3. Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data primer. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku yang mendukung penelitian, jurnal tentang permukiman kumuh, tesis yang digunakan dalam penelitian relevan serta data sekunder yang telah peneliti temukan di lapangan terkait pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman melalui Program KOTAKU.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik membandingkan data hasil pengamatan dengan suatu dokumen terkait dengan data hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:246) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kualitas permukiman dapat dilihat melalui evaluasi program pada setiap tahunnya. Evaluasi tersebut dapat dilihat dari intervensi yang telah dilakukan oleh para aktor yang terlibat untuk mengurangi tingkat kekumuhan. Model evaluasi program yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process and Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Evaluasi pelaksanaan program KOTAKU dalam meningkatkan kualitas permukiman di Kabupaten Wonosobo dilihat dari dimensi konteks, input, proses dan produk.

1. Dimensi Konteks

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses untuk mencapai keberhasilan program. Proses penyusunan program tersebut melalui beberapa tahapan. Menurut Winarno (2014:36), tahap-tahap penyusunan kebijakan publik adalah dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan.

Penyusunan agenda dalam pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh dimulai dengan menilai kebutuhan yang ada di masyarakat yang dianggap sebagai suatu

masalah penting di dalam permukiman kumuh. Pada tahap formulasi kebijakan, penilaian kebutuhan tersebut dijadikan sebagai sumber acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang harus dihadapi dalam penanganan permukiman kumuh. Pada tahap adopsi kebijakan, penanganan permukiman kumuh dilakukan melalui program KOTAKU dan disepakati dengan pedoman pelaksanaan agar berjalan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Pada tahap implementasi, program ini dilakukan oleh semua aktor yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh sesuai dengan tugasnya masing-masing dan masyarakat sebagai pelaksana. Sedangkan pada tahap evaluasi kebijakan, program KOTAKU dinilai keberhasilannya dengan melihat intervensi yang dilakukan oleh para aktor untuk penanganan permukiman kumuh.

Menilai kebutuhan yang ada di masyarakat dalam penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo, terutama yang masuk dalam SK Bupati tentang lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kumuh perkotaan. Dari wilayah dampingan KOTAKU Kabupaten Wonosobo dengan hasil pendataan ditingkat basis

dan observasi ditingkat lapangan hanya ada 9 desa kelurahan dari 20 Desa/Kelurahan dampungan yang mempunyai lokasi kawasan kumuh. Dari 9 desa wilayah kumuh terdiri dari 5 Desa/kelurahan yaitu Kelurahan Jaraksari, Kelurahan Sambek, Kelurahan Mlipak, Kelurahan Wonosobo Timur dan Kelurahan Wonosobo Barat.

Program KOTAKU merupakan program kelanjutan dari program-program sebelumnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada awalnya terdapat program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) pada tahun 1999-2006, PNPM Mandiri pada tahun 2007-2014, Kemudian pada tahun 2015 terdapat program P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) dan saat ini adalah Program KOTAKU. Penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Wonosobo lebih pada kawasan prioritas yang masuk dalam SK Bupati.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hardian Wahyu Widiyanto (2016) yang menyebutkan bahwa PLP-BK merupakan program yang digagas oleh Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai intervensi dari PNPM Mandiri Perkotaan. Tujuan dari PLP-BK adalah

mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman dan sehat. Program PLP-BK dimulai sejak tahun 2008 dan sasarannya adalah kelurahan atau desa.

Terdapat tiga pola penanganan permukiman kumuh yang terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2011 yang terdiri dari pencegahan, peningkatan kualitas dan pengelolaan. Pencegahan dilakukan pada wilayah yang tidak masuk dalam SK Kumuh di suatu wilayah atau diluar wilayah delineasi. Peningkatan kualitas adalah wilayah yang masuk dalam SK Kumuh atau masuk dalam wilayah delineasi. Wilayah tersebut adalah wilayah prioritas dalam penanganan permukiman kumuh dengan dilakukan intervensi kegiatan yang mendukung pengurangan kumuh. Pola penanganan permukiman kumuh yang ketiga adalah pengelolaan. Apabila sudah ada kegiatan atau intervensi yang dilakukan untuk pengurangan kumuh maka akan ada pemeliharaan wilayah agar wilayah tersebut tidak menjadi kumuh kembali yang dilakukan oleh masyarakat. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penanganan permukiman kumuh lebih diutamakan terhadap wilayah yang masuk dalam peningkatan kualitas untuk menjadi prioritas.

2. Dimensi Input

Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019, adalah strategi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat melalui program KOTAKU yang menggunakan sinergi pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, penguatan peran pemda sebagai nahkoda dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota. Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan permukiman kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Maksud dari pelaksanaan program KOTAKU adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di kawasan permukiman kumuh perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah. Selain itu juga terdapat tujuan dari pelaksanaan program KOTAKU yaitu memperbaiki

akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemda untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan. Dengan adanya hal tersebut diperlukan kerjasama antar aktor untuk mengurangi tingkat kekumuhan yang ada disuatu wilayah menjadi nol persen.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elly Luchritia Nova (2010), bahwa peran aktor atau pelaku dalam upaya peremajaan permukiman kumuh ini adalah pemerintah, konsultan pembangunan dan organisasi pelaksana dalam penyelenggaraan pembangunan. Di dalam penelitian tersebut telah disebutkan bahwa kedudukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh memiliki peran untuk mengendalikan secara adil.

Koordinator dalam program KOTAKU adalah dinas perhubungan dan perumahan rakyat yang sekaligus menjadi koordinator POKJA PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman). POKJA PKP ini adalah gabungan dari beberapa instansi

terkait yang menjadi jembatan kolaborasi. Di tingkat kabupaten/kota juga terdapat koordinator kota yang membawahi beberapa kabupaten di Jawa Tengah, salah satunya adalah Kabupaten Wonosobo. Koordinator kota ini mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan program.

Di tingkat kelurahan/desa juga terdapat peran LKM/BKM sebagai jembatan bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hardian Wahyu Widiyanto (2016), bahwa BKM merupakan wadah perwakilan masyarakat di tingkat kelurahan dengan menggali aspirasi dari seluruh masyarakat. LKM mempunyai beberapa bagian di dalamnya, yaitu ada UPL (Unit Pengelola Lapangan), UPK (Unit Pengelola Keuangan), dan UPS (Unit Pengelola Sosial).

Dalam penanganan permukiman kumuh, terdapat tujuh indikator untuk mengukur tingkat kekumuhan masing-masing wilayah. Tujuh indikator tersebut meliputi keteraturan dan kepadatan bangunan, jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik. Hal tersebut juga disebutkan oleh Raldi Hendro K (2001:75), terdapat lima bentuk fasilitas

yang perlu disediakan di suatu lingkungan permukiman, meliputi: (a) penyediaan air bersih, (b) penyaluran air kotor, (c) pembuangan limbah padat, (d) drainase, dan (e) jalan lingkungan.

Strategi dalam pelaksanaan program KOTAKU adalah kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh. Hal tersebut dengan menyiapkan landasan penyelenggaraan, agar peningkatan kualitas permukiman kumuh memiliki aspek legalitas dan dasar hukum dalam pelaksanaannya yang meliputi regulasi dan aturan main yang harus tersedia sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dan menyusun pedoman teknis penanganan kawasan permukiman kumuh. Dengan adanya hal tersebut, pelaksanaan program KOTAKU membutuhkan peran kolaborasi yang saling bersinergi dalam mewujudkan pengurangan kumuh menjadi nol persen dengan intervensi kegiatan-kegiatan secara nyata dengan strategi yang telah ditentukan.

3. Dimensi Proses

Setiap pelaksanaan sebuah kegiatan dalam implementasinya diperlukan adanya persiapan yang matang dalam keberhasilan program tersebut, baik dari sosialisasi sampai pemanfaatan dana. Persiapan pelaksanaan prpgram

dilakukan oleh para aktor yang terlibat terutama ditingkat pusat dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan mengetahui apa saja target dan tujuan serta sasaran program. Pelatihan tersebut dilakukan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Sosialisasi program kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan rutin yang ada di masyarakat seperti kumpulan PKK, kumpulan bapak-bapak, pengajian dan perkumpulan warga lainnya.

Kondisi wilayah disuatu Kelurahan dapat dilihat dari data *baseline* yang diisi langsung oleh masyarakat. Data tersebut mencakup tujuh indikator penanganan permukiman kumuh yang meliputi sembilan belas aspek sesuai dengan sasaran 100-0-100. Data tersebut diisi oleh masyarakat sendiri karena mereka yang mengetahui kondisi lingkungan mereka sendiri. Selain itu, data *baseline* ini juga sebagai acuan pokok dalam pembuatan dokumen perencanaan permukiman kumuh yang ada di wilayah Kelurahan. Dokumen tersebut memuat kondisi riil yang ada di lapangan yang sering disebut dengan RPLP (Rencana Penanganan Permukiman Kumuh). Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardian Wahyu Widiyanto (2016), bahwa RPLP disusun

dari masalah, potensi serta solusi yang dikumpulkan di lapangan.

Pelaksanaan program KOTAKU sangat membutuhkan keterlibatan dari masyarakat sebagai pelaksananya sendiri. Sehingga hal tersebut berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan agar kegiatan tersebut mampu berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardian Wahyu Widiyanto (2016) dan Elly Luchritia Nova (2010), bahwa pelaksanaan program sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses implementasinya. Setiap implementasi program pasti akan ada faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah anggaran, keterbatasan lahan, pola pikir masyarakat. Sedangkan faktor pendukung adalah swadaya masyarakat yang sangat tinggi serta peran kolaborasi antar aktor yang terlibat.

Dinas permukiman tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dinas terkait dan peran koordinator kota serta partisipasi masyarakat sebagai pelaksana dalam menjalankan suatu kegiatan. Upaya yang terus dilakukan untuk memperkuat peran kolaborasi adalah melalui pendekatan ke

dinas-dinas yang terkait bahwa pelaksanaan program tersebut menjadi tugas bersama dan pemerintah daerah sebagai koordinator dan harus menyelesaikan permasalahan yang ada untuk mengurangi tingkat kekumuhan untuk mencapai sasaran nol persen.

4. Dimensi Produk

Pelaksanaan suatu program yang sudah dilaksanakan akan menghasilkan sebuah produk. Produk tersebut dapat bermanfaat apabila dalam pelaksanaannya dikerjakan dengan baik dan dapat berkelanjutan. Sehingga untuk mengukur keberhasilan produk yang telah dicapai dibutuhkan sebuah penilaian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam program KOTAKU, semua kegiatan dalam pengurangan kumuh dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai nol persen permukiman kumuh. Intervensi yang dilakukan pemerintah sampai tahun ini adalah lebih kepada pembangunan infrastruktur baik untuk jalan lingkungan dengan adanya pelebaran jalan maupun pengelolaan limbah yang termasuk dalam akses sanitasi.

Intervensi yang dilakukan meliputi pelebaran jalan, pembangunan senderan di wilayah-wilayah yang rawan longsor karena posisi kemiringan lahan disuatu

daerah berbeda-beda. Pembangunan senderan ini berguna untuk mengurangi longsor. Intervensi yang lainnya adalah untuk pengelolaan pembuangan limbah yang terdiri dari *saptitank* individu dan komunal. Sampai saat ini pembangunan *saptitank* sudah berjalan hampir secara keseluruhan di setiap wilayah yang masuk dalam SK Kumuh. Setiap wilayah mendapatkan *saptitank* individu dengan jumlah yang berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan data *baseline* yang ada di setiap kelurahan. Apabila pengajuan jumlah penerima belum terpenuhi secara keseluruhan dapat dilanjutkan pada tahun selanjutnya karena sistem dalam sebuah pembangunan dilakukan secara bertahap. Dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh para aktor sampai saat ini sudah cukup baik untuk pengurangan tingkat kekumuhan di setiap kelurahan yang masuk dalam SK Kumuh.

Sebenarnya, ketercapaian program sampai akhir tahun 2017 ini sudah cukup signifikan untuk mengurangi tingkat kekumuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan oleh para aktor untuk pembangunan di suatu wilayah. Tetapi hal tersebut belum bisa menjamin adanya pengurangan kumuh karena dalam pengurangan kumuh sudah ada perhitungan dalam mencari berapa luasan wilayah yang sudah tertangani

dengan berbagai intervensi dari pemerintah. Perhitungan tersebut dapat diketahui dari data *baseline* yang ada di setiap kelurahan terutama yang masuk dalam SK Kumuh. Apakah dengan adanya intervensi tersebut mampu mengurangi tingkat kekumuhan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari luasan hektar wilayah yang masuk dalam SK Kumuh apakah sudah berkurang dari luasan kumuh sebelumnya atau belum.

Perhitungan pengurangan kumuh sampai saat ini belum ada acuan resminya menggunakan cara yang seperti apa karena terdapat dua versi perhitungan pengurangan kumuh yang dapat dilakukan baik dari pusat maupun ditingkat konsultan. Intervensi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam penanganan permukiman kumuh sudah cukup signifikan. Berikut ini adalah tabel capaian program sampai akhir tahun 2017:

Tabel 2. Kesimpulan Capaian Penanganan Permukiman Kumuh Tahun 2017

No	Kelurahan	Luas Kumuh Kondisi Awal (Ha)	Luas Kumuh Kondisi Akhir (Ha)	Capaian Penanganan
1	Jaraksari	30,31	28,29	2,02
2	Sambek	15,07	13,06	2,01
3	Mlipak	13,09	9,06	4,03
4	Wonosobo Timur	0,91	0,61	0,30
5	Wonosobo Barat	11,46	10,03	1,43
Total		70,83	61,05	9,79

Sumber: Diolah oleh peneliti dari data Feedback Pemutakhiran Baseline

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian penanganan di setiap kelurahan berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari pengurangan luasan hektar dari kondisi awal tingkat kekumuhan di lima wilayah tersebut yaitu 70.84 hektar menjadi 61,05 hektar dengan capaian pengurangan seluas 9.79 hektar. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah lebih pada pembangunan yang dilakukan di wilayah yang berada di wilayah SK Kumuh. Pada tahun 2017, pemerintah telah mengadakan pendataan terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terutama wilayah kumuh yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2018. Sampai tahun 2017, program tersebut masih berupa usulan rumah yang dilakukan oleh LKM untuk diajukan agar mendapatkan bantuan. Dengan adanya hal tersebut, tahun 2019 diharapkan sudah mampu mencapai 0 persen kumuh sesuai sasaran dan target dari pelaksanaan program KOTAKU.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait peningkatan kualitas permukiman melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Wonosobo sesuai data dan fakta di lapangan belum berjalan efektif. Meskipun dari pelaksanaan program yang dilihat dari dimensi konteks, input, proses dan produk sudah terlaksana dengan optimal. Akan tetapi, dari evaluasi

pencapaian sasaran program untuk menuju nol persen hektar kumuh sampai akhir tahun 2017 masih belum maksimal yang dilihat dari kurun waktu tahun 2019 yang harus mencapai nol persen luasan kumuh. Hal ini dapat dilihat dari luasan hektar kumuh yang sudah tertangani hanya 9,79 hektar dari seluruh luasan kumuh 70,834 hektar di Kabupaten Wonosobo. Namun di dalam pelaksanaan program mulai dari persiapan sampai dengan pembangunan sudah berjalan dengan baik.

Intervensi kegiatan yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat sudah sesuai dengan target sasaran program 100-0-100 terutama dalam pembangunan infrastruktur untuk menghilangkan stigma kumuh di Kabupaten Wonosobo. Partisipasi masyarakat juga sangat tinggi dalam proses pembangunan karena mereka sebagai pelaku utama dilibatkan. Tetapi hal tersebut belum bisa menjamin adanya pengurangan kumuh karena dalam pengurangan kumuh harus ada perhitungannya melalui data *baseline* dengan melihat luasan hektar yang sudah tertangani. Akan tetapi, perhitungan kumuh belum mempunyai acuan secara resmi dari tingkat pusat sehingga tim koordinator menggunakan perhitungan menurut tim koordinator. Di dalam pelaksanaan program terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam proses pembangunan. Faktor pendukung pelaksanaan program yaitu

swadaya masyarakat yang tinggi terutama dalam menyumbang tenaga dalam pembangunan dan peran kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pengentasan kekumuhan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program adalah terbatasnya anggaran, terbatasnya lahan serta pola pikir masyarakat yang masih beragam.

Saran

1. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar aktor yang terlibat terkait *dateline* pengumpulan data setiap kelurahan agar perhitungan kumuh dapat dilakukan tanpa harus dikejar-kejar dalam pengumpulannya agar dapat menjadi evaluasi pengurangan kumuh di tahun berikutnya.
2. Perlu adanya acuan resmi dalam perhitungan kumuh dari pusat secara keseluruhan agar tidak ada kesalahan dalam perhitungan kumuh antar wilayah
3. Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program perlu adanya peran aktif para aktor dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain terutama untuk anggaran agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2009). *Evaluasi Pogram Pendidikan*. Jakarta:PT Bumi Aksara.

Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung:Pustaka Setia.

Koestoer, Raldi Hendro. (2001). *Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

_____. (2014.) *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sadyohutomo, Mulyono. (2009). *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta:Bumi Aksara.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitaitaif, dan R&D)*.Bandung:Alfabeta.

Suryani, Nunuk dan Leo Agung. (2012). *Strategi Belajar Mengajar*. Yogyakarta:Ombak.

Tarigan, Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

_____. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal dan Artikel Ilmiah Lainnya:

Safaruddin, Taufiq Saidi, Izziah. (2015). *Penataan Perumahan Kumuh Desa Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe*. Banda Aceh:Universitas Syiah Kuala. Jurnal Teknik Sipil. Vol.5, No 1, hal 61-70.

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Elly Luchritia Nova. (2010). *Peremajaan Permukiman Kumuh di Kelurahan Gunung Elai, Lok Tuan, dan Guntung Kota Bontang*. Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro.

Hardian Wahyu Widiyanto. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

Internet:

<http://www.volume1.penanganan.kawasan.permukiman.kumuh.html/>.

diakses pada hari Senin, 3 Juli 2017 pada pukul 15.08 WIB

<https://www.suaramerdeka.com/> diakses pada hari Selasa 1 Agustus 2017 pada pukul 15.05 WIB

<http://prokotaku.blogspot.co.id/> diakses pada hari Senin, 7 Agustus 2017 pada pukul 13.45 WIB

<http://ciptakarya.pu.go.id/> diakses pada hari Senin, 3 Juli pada pukul 15.10 WIB

Landasan Hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia No 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri PUPR No.
02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019.

Surat Keputusan Bupati Wonosobo
Nomor:653/247/2014 Tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh Perkotaan
di Kabupaten Wonosobo.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta
Karya Nomor: 40/SE/DC/2016
tentang Pedoman Umum Program
Kota Tanpa Kumuh.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta
Karya Nomor: 88/SE/DC/2016
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Direktorat
Pengembangan Kawasan
Permukiman.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Alamat: Karangmalang Yogyakarta 552281 Telp.586168, Psw: 247, 248, 249

**Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel *E-Journal* Mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

Nama Mahasiswa	Sulista Yuniati
NIM	14417141011
Judul Tugas Akhir Skripsi	PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KABUPATEN WONOSOBO
Nama Dosen Pembimbing	Sugi,Rahayu, M.Pd., M.Si
Nama Dosen <i>Reviewer</i>	Argo Pambudi M.Si
Tanggal Ujian Skripsi	19 Maret 2018

Yogyakarta, 5 April 2018

Menyetujui,

Dosen *Reviewer*

(Drs. Argo Pambudi M.Si)

NIP. 19620224 199803 1 001

Dosen Pembimbing

(Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si).

NIP. 19540807 197803 2 002

Pengelola *E-Journal*
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

(Pandhu Yujanjaya, MPA)

NIP. 11510900713614